



Ingatkan Silpa Rp 1 Triliun

PONTIANAK, TRIBUN - Anggota DPRD Provinsi Kalbar, H Affandie AR berharap Pemprov Kalbar dapat bekerja lebih baik lagi di tahun 2020, mengingat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) di tahun 2019 mencapai Rp 1 triliun.

"Perhatian saya di tahun 2020 ini, adalah Silpa, terlalu banyak bagi, Kalbar Rp 1,1 triliun, sejak saya jadi anggota dewan dari 2009 sampai saat ini belum pernah kejadian seperti itu, paling tinggi Silpa Rp 200 miliar. Nah sekarang Rp 1,1 triliun, itu artinya pemda kurang bekerja dengan maksimal, termasuk gubernurnya," katanya, Selasa (7/1).

Menurutnya, satu diantara penyebab anggaran tak terserap dengan baik juga karena banyaknya pergantian di OPD.

"Kenapa anggaran ini tidak terserap secara baik, karena memang banyak pergantian pejabat di tengah jalan, kan gubernur tidak setuju dengan pejabat lama, digantilah pejabat baru, pejabat baru mana berani neken barang bermiliar-miliaran, tentu dipelajari dulu, dengan dipelajari dulu akan terjadi keterlambatan," paparnya.

"Oleh karena itu saran kita kepada Gubernur, kalau mau ganti pejabat, jangan ganti di tengah jalan, ganti di awal tahun atau di triwulan I," timpal politisi Demokrat ini.

Lebih lanjut, ia juga berharap agar gubernur berhenti untuk menyalahkan OPD.

"Sekarang gubernur mencak-mencak ini menyalahkan OPD mereka, padahal ini juga kesalahan gubernur, karena bagaimanapun ini adalah tanggungjawab gubernur," pintanya.

Mengenai Silpa yang Rp 1,1 triliun, ia menilai Gubernur juga harus minta persetujuan ang-

gota DPRD Kalbar mengenai tindak lanjutnya dan tidak boleh mengambil keputusan sendiri.

Hal ini karena, mitra kerja Gubernur ialah DPRD dan merupakan mitra sejajar. Terlebih agar Pemprov Kalbar kembali meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kita khawatir tahun 2018 kemarin kita dapat penilaian WDP, yang selama 6 tahun sebelumnya WTP, sekarang yang saya takutkan 2019 penilaian BPK nanti disclaimer, keuangan Provinsi Kalbar tidak bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

"Alasan Gubernur kemarinkan cari kontraktor berkualitas, pengerjaan bagus, sekarang saya mau tanya, yang namanya kontraktor itu punya sertifikasi semua, kalau sertifikasi tidak ada itu berarti mereka kontraktor abal-abalan,

nah kalau kita mengatakan kalau kontraktor itu tidak profesional, artinya Gubernur juga menyalahkan yang mengeluarkan sertifikasi, itu kan lebih berat lagi urusannya," tambah H Affandie.

Padahal, menurutnya jika Silpa sebesar Rp 1,1 triliun dimaksimalkan dan dibelanjakan untuk orang Kalbar, maka akan mendukung ekonomi Kalbar.

"Kita harapkan kedepan adakan perencanaan dengan baik, SDM kita baik, sehingga tidak terjadi lagi Silpa seperti ini," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah berharap Pemprov Kalbar dapat meningkatkan a n

serapan anggaran untuk 2020 ini.

"Tahun 2020 seharusnya bisa 100 persen, dan Pak Gubernur sudah menyampaikan ke kita, ke teman-teman pimpinan dan ketua fraksi untuk 2020 akan memulai kegiatan pembangunan lebih awal," katanya.

Menurut Suriansyah, belum maksimal serapan anggaran pada 2019 lalu, juga disebabkan oleh ketidaksiapan dari OPD sendiri.

"Kalau dulu kita baru mulai semester ketiga, dan waktu itu masih banyak ketidaksiapan OPD-OPD untuk melaksanakan pembangunan sehingga setelah Pak Gubernur mengganti SOP baru jalan. Seperti PU tidak jalan-jalan, setelah diganti baru jalan," jelasnya.

Maka dari itu, dijelaskannya pula, DPRD Kalbar melalui alat kelengkapan dewan akan memanggil mitra kerja agar pembangunan dapat maksimal.

"Kita sudah mulai memanggil melalui komisi-komisi mempertanyakan permasalahan yang ada, memang kadang masalah utamanya adalah ketidaksiapan OPD sendiri untuk melaksanakan pekerjaan," katanya.

Termasuk, ia juga mendorong agar Gubernur segera melakukan penyerdehanaan birokrasi terkait dengan pembangunan dan perizinan.

"Saya melihat birokrasi di OPD harus disederhanakan dan kita menunggu langkah Pak Gubernur dalam rangka melaksanakan kebijakan Presiden untuk menyederhanakan eselon tiga dan empat," katanya. (dho)



H Affandie